

BURUH PERKEBUNAN DI SUMATERA TIMUR: SEBUAH TINJAUAN SEJARAH

Oleh: Andi Suwirta ^{*)}

ABSTRAKSI:

Sistem usaha perkebunan yang semula dikembangkan sejalan dengan cita-cita politik liberal itu ternyata membawa dampak yang saling berlawanan. Di satu sisi para pengusaha perkebunan – dengan dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda – memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar. Sedangkan di sisi lain para buruh dan penduduk yang ada di daerah perkebunan itu tidak mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berarti. Sebuah tulisan reflektif-kritis dengan mengajukan kasus usaha perkebunan di Sumatera Timur sebagai contoh.

Pengantar

Selama lebih dari satu abad, tulis O'Malley, perkebunan merupakan aspek terpenting dalam pemandangan ekonomi di Indonesia pada masa kolonial.¹ Usaha perkebunan yang semula diadakan di Jawa itu, pada menjelang akhir abad ke-19 mulai dikembangkan dan meluas di luar pulau Jawa, khususnya Sumatera. Perluasan usaha perkebunan itu

***)Drs. Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Lahir di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 9 Oktober 1962. Menyelesaikan pendidikan sarjana (Drs.) di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung pada tahun 1989; dan pendidikan S-2 (M.Hum.) di Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UI Jakarta pada tahun 1996 dengan menulis tesis *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), 1945-47* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000). Menulis beberapa buku, diantaranya adalah *Revolusi Indonesia dalam News and Views: Sebuah Antologi Sejarah* (Bandung: Penerbit Suci Press, 2001). Untuk kepentingan akademis, Drs. Andi Suwirta, M.Hum. dapat dihubungi dengan alamat: Komp. Vijaya Kusuma B11/15 Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Tlp.(022) 7837741.

¹William Joseph O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar" dalam Anne Booth, William J.O'Malley, dan Anna Wiedemann (Ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Terjemahan (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988), hlm.197.

nampaknya sejalan dengan proses ekspansi dan pasifikasi kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Nusantara dalam rangka menerapkan kebijakan politik *Pax Neerlandica*-nya yang sukses.

Sementara itu wilayah perkebunan (*cultuurgebeid*) di Sumatera Timur, mengalami perkembangan yang pesat. Selain tanahnya yang cocok juga dikarenakan tanaman seperti: tembakau, karet, teh, kopi, dan kelapa sawit memiliki prospek yang sangat menguntungkan dalam pasaran dunia.² Sehingga tidaklah mengherankan kalau pemerintah kolonial Belanda begitu antusias dalam mendukung golongan pengusaha swasta untuk membuka perkebunan dan menanamkan modalnya di daerah itu. Usaha perkebunan memang berkembang juga di daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera Selatan; tetapi kegiatan utama dari perkebunan di luar pulau Jawa adalah daerah pantai timur Sumatera ini.

Usaha perkebunan yang luas, biasanya, memerlukan banyak tenaga kerja atau buruh perkebunan. Sebab kalau kita membahas tentang “perkebunan”, maka secara konseptual aspek-aspek seperti: tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan organisasi tidak bisa diabaikan.³ Tulisan ini, dengan demikian, akan mengkaji dan menyoroti tentang masalah “buruh perkebunan” di Sumatera Timur. Di dalamnya akan dibahas: (1) bagaimana kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam mengembangkan usaha perkebunan; (2) bagaimana usaha pemerintah kolonial dan pengusaha perkebunan dalam merekrut para buruh; dan (3) usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan para buruh agar tetap bekerja di daerah perkebunan itu.

Usaha Perkebunan di Sumatera Timur

Nampaknya benar juga ungkapan bahwa terdapat hubungan yang alamiah dan saling menguntungkan antara pemerintah kolonial di satu sisi dengan usaha/pengusaha perkebunan di sisi lain. Sejak tahun 1870,

²Wilayah perkebunan di Sumatera Timur, sekarang termasuk daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada masa kolonial Belanda, terdapat sekitar 34 kerajaan lokal di wilayah ini, tetapi yang paling penting adalah Kesultanan Deli, Serdang, dan Langkat. Wilayah perkebunan di Sumatera Timur membentang luas, mulai dari Langkat di ujung utara sampai dengan Siak di sebelah selatan. Untuk lebih jelasnya lihat peta dan gambar di halaman belakang tulisan ini.

³William J.O'Malley, 1988, *Op.Cit.*, hlm.198.

kebijakan politik kolonial Belanda mengalami perubahan dan cenderung mengarah ke liberalisme dalam bidang ekonomi. Sejak itu pemerintah kolonial Belanda memberlakukan “Politik Pintu Terbuka” (*Open Door Policy*) dan mengambil sikap *laissez faire* di mana peran dominan pemerintah dalam perekonomian, termasuk usaha perkebunan, mengalami penurunan.⁴ Walaupun begitu, prinsip pokok kebijakan “agar daerah koloni tetap menghasilkan uang”, yang terkenal dengan slogannya *How to Manage the Colony for Money*, tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial.⁵

Usaha perkebunan di Sumatera Timur dirintis pertama kali oleh Jacobus Nienhuys, seorang pengusaha Belanda, yang berkesimpulan (setelah melakukan penelitian) bahwa tanah di daerah itu sangat cocok untuk usaha perkebunan. Pada tahun 1863, ia memperoleh tanah seluas 4.000 *bau* (*bouw*) dari Sultan Mahmud, penguasa Deli, untuk membuka usaha perkebunan tembakau. Usaha Nienhuys itu ternyata berhasil, karena lahan di daerah tersebut mampu menghasilkan daun tembakau pembungkus cerutu yang halus dan mahal harganya di pasaran dunia. Maka begitulah, setelah dikirim ke Rotterdam dan dijual di pasaran Eropa, harganya bisa mencapai 48 sen gulden per ½ kilogram. Bahkan pada tahun 1865, harganya meningkat menjadi 149 sen gulden per ½ kilogram. Menurut Van der Wal,⁶ hal itu berarti bahwa harga tembakau dari perkebunan di Sumatera Timur ini hampir 4 kali lipat dari harga daun tembakau Kuba, dan lebih dari 4 kali lipat dari harga tembakau Jawa.

Melihat usaha yang menguntungkan dari Nienhuys itu, maka kemudian banyak pengusaha perkebunan Eropa lainnya, seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Swiss, yang tertarik untuk menanamkan investasi dan mengambil keuntungan dalam bidang perkebunan di daerah Sumatera Timur. Pemerintah kolonial Belanda sendiri, tentu saja, mendorong dan membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi dan modal asing swasta itu sesuai dengan politik liberalnya. Ditambah lagi oleh suatu kenyataan bahwa ketergantungan pemerintah kolonial pada

⁴Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java* (London: The Macmillan Company, 1904), terutama Bab X, XI, dan XII.

⁵Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).

⁶Sebagaimana dikutip oleh William J.O'Malley, 1988, *Op.Cit.*, hlm.224-25.

pajak tanah dan pajak perorangan, semakin lama semakin berkurang. Sehingga sekarang lebih mengandalkan pada pajak keuntungan dari sektor usaha perkebunan. Tabel berikut ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan usaha perkebunan di Sumatera Timur.

**Perkembangan Barang Modal dalam Industri Perkebunan
di Sumatera Timur dalam F 1.000.000. ⁷**

Tahun	Belanda	Inggris	Amerika	Lain-lain	Jumlah
1913	110	57	17	23	206
1924	242	80	75	74	423
1929	361	125	53	104	642

Keberhasilan usaha perkebunan di Sumatera Timur, sebenarnya tidak bisa dilepaskan juga dari keberhasilan perusahaan-perusahaan Belanda dalam melakukan negosiasi dan mempengaruhi para penguasa lokal di daerah itu – seperti Sultan Deli, Serdang, dan Langkat – agar mau mengadakan perjanjian dan menandatangani kontrak jangka panjang untuk menyediakan lahan perkebunan yang luas. Seperti telah disebutkan bahwa Nienhuys mula-mula berhasil memperoleh tanah seluas 4.000 *bau* itu dengan masa sewa selama 20 tahun dan biaya sewa yang sangat murah. Usaha itu kemudian diikuti oleh para pengusaha perkebunan Eropa lainnya, sehingga wilayah di Sumatera Timur itu telah menjadi “lautan perkebunan” yang luas.

Menurut Kal J. Pelzer, ⁸ pada menjelang tahun 1920-an perkebunan di Sumatera Timur telah mencapai luas yang mencengangkan. Mulai dari pusatnya di dekat Medan, perkebunan itu terhampar dalam rangkaian yang tak terputus-putus sepanjang 100 kilometer jaraknya ke arah timur-laut berbatasan dengan Aceh; kemudian 100 kilometer lagi jauhnya ke arah selatan ke bukit-bukit di balik kota Pematang Siantar; serta lebih dari 200 kilometer ke arah tenggara ke dataran tinggi di sekitar Prapat, di daerah Asahan.

⁷Sumber diambil dari Pieter Cruetzberg dan J.T.M. van Laanen (Ed.), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.258.

⁸ Karl J. Pelzer, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm.31-36 dan 4-44.

Barangkali juga menarik untuk dikaji – walaupun di luar pembahasan dalam tulisan ini – bahwa perluasan usaha perkebunan itu turut mempengaruhi pola sikap dan perilaku para penguasa lokal di Sumatera Timur. Sebagaimana dicatat oleh Reid,⁹ bahwa usaha perkebunan itu telah merubah perilaku banyak golongan elite tradisional sesudah tahun 1870-an. Para raja dengan keluarganya di kesultanan Sumatera Timur menjadi mampu mempertahankan atau memulai gaya hidup megah, berkat uang yang diperoleh dari sewa-sewa tanah perkebunan yang menjadi hak para raja. Sementara itu, kepentingan dan kesejahteraan hidup penduduk yang ada di daerah Sumatera Timur itu terabaikan. Sehingga, semakin lama usaha perkebunan itu dipandang oleh penduduk tidak lebih dari lambang penindasan dan kesewenang-wenangan, karena hak-hak istimewa *golongan elite* sangat diutamakan di satu sisi, sementara di sisi lain hak dan nasib *golongan alit* sangat diabaikan. Mungkin tepat ungkapan Tan Malaka ketika hidup dan tinggal di daerah itu pada tahun 1920-an bahwa inilah “*goudland*, tanah emas, surga buat kaum kapitalis; tetapi tanah keringat, air mata, maut, neraka untuk kaum proletar”.¹⁰ Hal-hal seperti itu pada gilirannya telah menimbulkan kondisi kesenjangan dan kecemburuan sosial, sehingga pada pertengahan tahun 1940-an pecah peristiwa revolusi sosial yang brutal di Sumatera Timur.¹¹

Buruh Perkebunan di Sumatera Timur

Usaha perkebunan selalu berhubungan dengan masalah buruh atau tenaga kerja. Tanpa buruh atau tenaga kerja yang cukup jumlahnya, maka usaha perkebunan yang luas itu tidak akan mendatangkan hasil yang menguntungkan. Agar diperoleh kemudahan dan keuntungan, maka para pengusaha perkebunan biasanya – dengan dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda – menetapkan peraturan-peraturan supaya tenaga buruh yang digunakan adalah mereka yang berpendidikan rendah dan mau dibayar dengan biaya murah. Hanya dengan cara seperti itu usaha

⁹ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.87-100.

¹⁰ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara (1)* (Jakarta: t.p., 1998), hlm.43.

¹¹ Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, terutama Bab V, VI, dan VIII. Baca juga Michael van Langenberg, “Sumatera Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah Keresidenan di Sumatera” dalam Audrey R. Kahin (Ed.), *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, Terjemahan (Jakarta: Grafiti Pers, 1990), hlm.117-49.

perkebunan dapat meraih sukses yang menguntungkan secara ekonomis.¹²

Bagaimanapun juga, usaha perkebunan yang luas itu memang telah menciptakan lapangan-lapangan kerja baru bagi penduduk. Lapangan kerja itu dapat berupa: pembangunan gudang untuk perkebunan tembakau, pembukaan lahan baru untuk perkebunan di daerah-daerah berbukit, dan *leveransir* pengepakan barang-barang dari semua hasil perkebunan. Tetapi dalam kenyataannya, hanya sedikit saja dari penduduk asli di Sumatera Timur yang tertarik untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan.¹³ Sebagian besar dari mereka lebih senang menjadi peladang bebas yang tidak terikat oleh perjanjian kerja seperti kalau menjadi buruh di perkebunan.

Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh itu, maka para pengusaha perkebunan terpaksa harus mendatangkan para buruh yang berasal dari daerah-daerah yang padat penduduknya. Pada awal perkembangannya, para pengusaha perkebunan mendatangkan para buruh dari Cina Selatan melalui agen-agen buruh di Semenanjung Malaya. Ketika Nienhuys pertama kali membuka daerah perkebunan tembakau, misalnya, maka dia mempekerjakan 88 orang Cina dan 23 orang Melayu sebagai buruh kasar di perkebunan itu.¹⁴

Kebijaksanaan untuk mendatangkan tenaga buruh dari Cina itu kemudian diikuti oleh para pengusaha perkebunan Eropa lainnya. Tetapi ketika usaha untuk mendatangkan buruh dari Cina itu mengalami hambatan – terutama karena pembatasan-pembatasan izin yang dilakukan oleh pemerintah Cina – maka para pengusaha perkebunan mulai mengalihkan perhatian ke Jawa, karena jumlah penduduknya yang cukup padat. Rekrutmen tenaga buruh dari Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur itu dimulai pada tahun 1870-

¹²Alec Gordon, "Indonesia, Plantation and the Post Colonial Mode of Production" dalam *Journal of Contemporary Asia*, No.2 (12), 1982, hlm.174.

¹³Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, hlm.80. Baca juga Razif, "Penguasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan Besar di Sumatera Timur: Tinjauan Historis" dalam *Prisma*, No.4, Th.XX (Jakarta: LP3ES, April 1991), hlm.41-5.

¹⁴Antony Reid, "Early Chinese Migration into North Sumatera" dalam Jerome Ch'en and Nicholas Tarling (Ed.), *Studies in the Social History of China and Southeast Asia* (London: Cambridge University Press, 1970), hlm.293.

an.¹⁵ Sehingga, jumlah buruh di perkebunan yang berasal dari pulau Jawa dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Sebagai gambaran pada tahun 1884, misalnya, terdapat 21.136 orang buruh Cina dan hanya 1.771 orang buruh Jawa yang bekerja di perkebunan Sumatera Timur. Pada tahun 1900, jumlah buruh Cina meningkat menjadi 25.224 orang, sedangkan buruh yang berasal dari Jawa meningkat pesat menjadi 239.281 orang. Selanjutnya perhatikan tabel berikut ini:¹⁶

Buruh	1884	1900	1916	1920	1925	1929
Cina	21.136	58.516	43.689	23.900	26.800	25.934
Jawa	1.771	25.224	150.392	212.400	168.400	239.281
India	1.528	2.460	--	2.000	1.500	1.019
d.l.l.						

Akibat langsung dari perkembangan usaha perkebunan di Sumatera Timur adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk di daerah itu. Dalam beberapa dekade saja, jumlah penduduk di daerah ini telah bertambah dengan pesat. Kalau pada tahun 1800 daerah Sumatera Timur merupakan wilayah yang masih jarang penduduknya, maka pada tahun 1905 jumlah penduduknya telah melebihi 500.000 jiwa.¹⁷ Bahkan pada tahun 1930, jumlah penduduk di Sumatera Timur membengkak menjadi 1.685.873 jiwa, dengan komposisi etnik yang sangat beragam. Namun yang menarik dari jumlah penduduk sebanyak itu, 39 persen adalah orang Jawa (termasuk orang Sunda dan Betawi). Orang Cina tercatat 11,4 persen, sedangkan orang Melayu “pribumi” yang mendiami daerah itu hanya 19,9 persen dari jumlah total penduduk yang ada. Selanjutnya lihat Tabel Jumlah Penduduk di Sumatera Timur pada Tahun 1930, dibawah ini:¹⁸

¹⁵Jan Breman, *Koelies, Planters en Koloniale Politiek* (Leiden: KITLV Uitgeverig, 1992), hlm.119-27.

¹⁶Sumber diperoleh dari Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, hlm.81.

¹⁷Karl J. Pelzer, 1985, *Op.Cit.*, hlm.83-7.

¹⁸Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, hlm.85.

ANDI SUWIRTA,
Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah

Asal Penduduk	Banyaknya	%	Jumlah	%
Eropa	11.079	0,7		
Cina	192.822	11,4		
India dan lain-lain	18.904	1,1		
Subtotal non-Indonesia			222.805	13,2
Jawa	589.836	35,0		
Batak Toba	74.224	4,4		
Mandailing-Angkola	59.638	3,5		
Minangkabau	50.667	3,0		
Sunda	44.107	2,6		
Banjar	31.266	1,9		
Aceh	7.795	0,5		
Lain-lain	24.646	1,5		
Subtotal Kaum Pemandang			882.189	52,3
Melayu	334.870	19,9		
Batak Karo	145.429	8,6		
Batak Simalungun	55.144	5,6		
Lain-lain	5.436	0,3		
Subtotal Penduduk Pribumi			580.879	34,5
Jumlah Total Penduduk			1.685.873	100

Buruh Perkebunan dan Sistem Kontrak

Para buruh yang dibawa ke daerah perkebunan di Sumatera Timur itu, dilakukan dengan menggunakan *Sistem Kontrak*. Sistem ini biasanya mengikat masa kerja buruh selama tiga tahun, dengan biaya transportasi dan tempat tinggal ditanggung oleh para pengusaha perkebunan. Setelah masa kontrak itu selesai, para buruh boleh kembali ke daerah asalnya atas biaya perkebunan atau memperpanjang masa

kontrak kerja sesuai dengan keinginannya.¹⁹ Dengan demikian, secara eksplisit dan ideal sistem kontrak itu sebenarnya nampak demokratis dan tidak memberatkan semua pihak. Tapi dalam kenyataannya – sebagaimana akan terlihat nanti – sistem kontrak itu tetap membelenggu dan sangat menekan nasib para buruh perkebunan.

Buruh-buruh perkebunan yang dibawa ke daerah Sumatera Timur itu biasanya diperoleh melalui agen-agen perusahaan perkebunan di daerah asal mereka. Para buruh Cina, misalnya, diperoleh melalui agen-agen baik yang ada di Semenanjung Malaya, Singapura, maupun di daratan Cina sendiri. Sedangkan buruh yang berasal dari Jawa diperoleh melalui agen-agen *Deli Planters Vereeniging* (Perkumpulan para Pekebun Deli) yang dikelola oleh bangsa Eropa dengan petugas lapangan berasal dari orang-orang Jawa sendiri.²⁰ Para petugas lapangan ini di kalangan orang Jawa biasanya dikenal dengan sebutan *Werek-Deli*. Dalam mencari calon tenaga buruh untuk dipekerjakan di perkebunan Sumatera Timur itu, para *werek* melakukan berbagai macam cara, termasuk membujuk dan bahkan manipu dengan diiming-imingi ceritera tentang kesuksesan dan kesejahteraan hidup kelak di “negeri seberang”. Tentu saja yang menjadi sasaran biasanya adalah mereka yang berasal dari desa, buta huruf, kurang berpendidikan, masih polos, lugu dan – karenanya – mudah ditipu.

Bagaimanapun, pemberian “sistem komisi” dari orang-orang Eropa (pengelola agen) kepada para *werek* (petugas lapangan) dalam mencari dan mengusahakan tenaga buruh, telah menimbulkan cara-cara rekrutmen yang tidak sehat. Jumlah “komisi” yang diterima para *werek* memang cukup tinggi. Misalnya saja, untuk seorang calon buruh yang berhasil didapatkannya, *werek* menerima bayaran dari agen senilai dengan bayaran 266 hari kerja para buruh di Jawa. Menurut catatan Reid,²¹ pada masa itu upah rata-rata buruh berkisar antara 30-35 sen perhari. Bahkan pada tahun 1924, upah buruh perkebunan terendah 24 sen, yang bekerja di pabrik 53 sen, dan buruh tidak terampil di kota 80 sen. Tidaklah mengherankan, kalau bayaran “komisi” yang tinggi itu mendorong para

¹⁹Jan Breman, 1992, *Op.Cit.*, hlm.173-81; dan Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, hlm.81.

²⁰Jan Breman, 1992, *Op.Cit.*, hlm.217-27.

²¹Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, hlm.82.

werek menggunakan berbagai macam cara untuk memperoleh tenaga buruh buat bekerja di perkebunan Sumatera Timur.²²

Sebagai akibat dari sistem rekrutmen buruh yang tidak sehat itu, maka jumlah buruh yang bekerja di Sumatera Timur terus berkembang dari waktu ke waktu. Kalaupun ada buruh dari Jawa yang ingin bekerja secara sukarela di perkebunan, jumlahnya tidak banyak dan hal itu terutama berkaitan erat dengan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Menurut Geertz,²³ bahkan hal itu dikarenakan semakin menyempitnya tanah pertanian di Jawa yang membawa kemiskinan pada sebagian penduduk, sebagai akibat diberlakukannya Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) oleh pemerintah kolonial Belanda.²⁴ Akhirnya, menurut catatan Thee Kian Wie,²⁵ dari sekitar 300 usaha perkebunan yang terpisah-pisah di Sumatera Timur itu, telah menyewa dan mempekerjakan lebih dari 500.000 orang buruh untuk menghasilkan komoditi ekspor.

Meskipun para buruh perkebunan diberi kebebasan untuk memilih: (1) apakah akan terus bekerja; atau (2) kembali ke kampung mereka setelah kontrak kerja selesai, ternyata sebagian besar buruh dari Jawa tidak bisa melakukan pilihan yang terakhir. Jadi, begitu kontrak kerja mereka habis para buruh itu memperbahau kembali kontrak kerjanya dengan pihak perkebunan. Hal itu berbeda dengan buruh Cina, di mana sebagian besar mereka bisa keluar dari lingkungan perkebunan dan kemudian melakukan pekerjaan bebas seperti pedagang, ataupun menjadi tukang, dan hidup di daerah perkotaan. Menurut catatan

²²Parsudi Suparlan, "The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society", *Ph.D. Thesis Unpublsh* (USA: University of Illionis, 1976), hlm.109.

²³Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1963). Baca juga kajian yang lebih mendalam tentang Sistem Tanam Paksa dari Cornelis Fasseur, *The Politics of Colonial Exploitation Java: The Dutch and the Cultivation System* (Ithaca, New York: Southeast Asia Program, 1992).

²⁴Kajian mutakhir tentang Sistem Tanam Paksa yang tidak selamanya buruk, malahan terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa "*daya beli para petani di Jawa telah meningkat pesat sejak akhir dasawarsa 1830-an*". Lihat, misalnya, studinya R.E. Elson, *The Cultivation Sytem and Agricultural Involution* (Melbourne: Centre of Southeast Asia Studies, Monash University, 1978); dan Robert van Niel, *Java Under the Cultivation System* (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1992).

²⁵Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatera, 1863-1942* (Jakarta: National Institute of Economic and Social Research, 1977), hlm.41.

O'Malley,²⁶ dari 200.000 orang Cina yang tinggal di daerah Sumatera Timur pada tahun 1930, hanya 27.000 jiwa saja yang tinggal di daerah itu, sebanyak 240.000 jiwa bekerja di perkebunan, sedangkan selebihnya bekerja sebagai petani dan tinggal di pedesaan sekitar perkebunan.

Pertanyaannya sekarang adalah: “mengapa sebagian besar para buruh dari Jawa itu tidak bisa keluar dari daerah perkebunan, walaupun dilaporkan banyak dari mereka yang hidup menderita?” Dari studi-studi yang ada, nampaknya hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Tapi dalam tulisan ini hanya akan mengajukan tiga faktor saja yang dinilai cukup signifikan, sehingga para buruh perkebunan di Sumatera Timur – terutama yang berasal dari Jawa – tidak berdaya untuk memperbaiki nasib mereka.

Pertama, karena adanya kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda dengan memberlakukan Peraturan Perburuhan (*Koeli Ordonnantie*) pada tahun 1880. Peraturan ini dikeluarkan, sebenarnya, untuk lebih melindungi kepentingan para pengusaha perkebunan dari pada untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para buruh. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa setelah sistem kontrak selesai (sebagaimana telah disinggung di muka), para buruh boleh kembali ke tempat asalnya atau memperpanjang kontrak lagi. Akan tetapi tidak adanya jaminan yang pasti dalam peraturan itu, telah melahirkan banyak penyelewengan, penekanan, dan penindasan dalam praktek pelaksanaannya. Lebih-lebih dalam peraturan itu juga ditetapkan *Poenale Sanctie*, yang berisi: “setiap *koeli* kontrak yang meninggalkan pekerjaannya, yang lari, dan yang mengabaikan kewajiban kerjanya bisa didenda atau dihukum penjara”.²⁷

Klosterboer,²⁸ bahkan kemudian memerinci berbagai jenis sanksi itu seperti: mereka yang menolak untuk bekerja dihukum dengan kerja paksa selama sebulan; mereka yang melarikan diri bila tertangkap dirantai dan dipukul dengan rotan; serta mereka yang melakukan perlawanan dan membuat kerusakan dikenakan denda sebesar 100 gulden atau malah

²⁶Lihat William J.O'Malley, “Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatera and Jogjakarta in the 1930's”, *Ph.D. Thesis Unpublisch* (Ithaca: Cornell University, 1977), hlm.120-21.

²⁷Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, hlm.82.

²⁸W. Klosterboer, *Involuntary Labour Since the Abolition of Slavery* (Leiden: E.J. Brill, 1960), hlm.50. Lihat juga Jan Breman, 1992, *Op.Cit.*, hlm.173-81.

dihukum gantung. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan para buruh perkebunan tidak berdaya, pasrah, dan menderita.²⁹

Walaupun peraturan *Poenale Sanctie* kemudian mendapat banyak kritikan dan menjadikan pemerintah kolonial Belanda turun tangan, namun tetap tidak membawa perbaikan nasib bagi para buruh, terutama yang sudah terikat dengan sistem kontrak kerja. Tabel berikut ini menunjukkan Keadaan Tenaga Buruh di Perkebunan Sumatera Timur pada Tahun 1930-an.³⁰

Pada Akhir Tahun	Kuli Kontrak dengan <i>Poenalie Sanctie</i>	Buruh Bebas dibawah Sistem Kontrak	Buruh Lepas	Jumlah
1928	247.769	30.909	17.781	296.459
1929	266.234	35.478	18.790	320.502
1930	236.747	40.304	13.959	294.010
1931	137.083	84.386	17.005	238.474
1932	37.338	140.259	8.546	176.143
1933	11.699	152.774	6.125	170.598
1934	6.029	152.080	8.677	166.766
1936	6.396	159.949	15.136	181.479
1938	4.670	185.360	18.376	208.406

Kedua, karena berkembangnya kegiatan perjudian yang diintrodusir dan dibiarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kolonial, perjudian merupakan fenomena sosial dan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan buruh di perkebunan. Sebagaimana diceritakan oleh Lulofs,³¹ bahwa para buruh perkebunan tidak dapat keluar dari daerah itu karena terjerat perangkap perjudian. Biasanya pada hari “Gajian Besar” yang diadakan dua minggu sekali, para bandar judi

²⁹Jan Breman, 1992, *Ibid.*, hlm.238-42.

³⁰Sumber diperoleh dari Anthony Reid, 1987, *Op.Cit.*, hlm.83.

³¹Madelon Lulofs, *Koeli*, Terjemahan (Jakarta: Grafiti Pers, 1984); dan baca juga novelnya yang lain dalam M.H. Szekely Lulofs, *Berpacu Nasib di Kebun Karet*, Terjemahan (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).

dari kota berusaha membujuk para buruh agar mau memasang uang untuk permainan judi. Akibatnya, banyak buruh banyak yang menunggak hutang, sehingga untuk dapat membayarnya terpaksa mereka memperpanjang kontrak kerja kembali dengan pihak pengusaha perkebunan.

Ketiga, karena adanya perdagangan candu yang diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagaimana diketahui, perdagangan candu sangat penting artinya bagi pendapatan ekonomi negara-negara kolonial, termasuk Belanda. Pada tahun 1921, misalnya, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan candu mentah sebanyak 177.344 kilogram dari India. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan itu adalah 44.035.000 gulden.³² Untuk meluaskan perdagangan candu di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda melakukan strategi pemasaran dengan menunjuk agen-agen candu yang diawasi dan digaji oleh pemerintah. Melalui agen-agen inilah candu itu didistribusikan kepada konsumen lewat kaki-tangan dan jaringan sub-agen yang tersebar di berbagai tempat.

Adalah menarik untuk dicatat bahwa jumlah candu yang terjual di Sumatera Timur cukup besar jumlahnya. Dari berbagai sumber yang ada diperoleh fakta bahwa golongan penduduk yang banyak mengkonsumsi candu di daerah ini juga adalah para buruh perkebunan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kedai-kedai candu yang didirikan di daerah Sumatera Timur. Bahkan menurut laporan Coolhas, *Kontrolleur* Distrik Padang Begadai di Kabupaten Deli Serdang, bahwa pada tahun 1933 terdapat 14 kedai candu (*verkoopplaatsen*) di daerahnya dan semuanya itu terletak di dekat perkebunan. Dilaporkan pula bahwa di distrik itu telah terjual kira-kira 10.457,96 *thail*³³ candu, dan menghasilkan keuntungan sebanyak 261.448 gulden.³⁴

Dari gambaran seperti di atas jelaslah bahwa perdagangan candu memang sengaja didorong dan diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan ganda: di satu sisi untuk kepentingan pendapatan

³²Sumber diperoleh dari The National Anti-Opium Association of China, *Opium: A world Problem* (Shanghai: NAOAC, 1929), Appendix.

³³Menurut *Almanak Nasional 1942*, 1 *thail* itu kira-kira sama dengan 1,5 ons Amerika Serikat.

³⁴W.W. Willoughby, *Opium as an International Problem: The Geneva Conferences* (Baltimore: The John Hopkins University Press, t.t.), hlm.111. Tentang laporan Coolhas lihat juga Karl J. Pelzer, 1985, *Op.Cit.*, hlm.256-87.

ekonominya, sedangkan di sisi lain untuk mengikat para buruh agar tidak bisa melepaskan diri dari daerah perkebunan. Sebab biasanya, para buruh yang telah kecanduan menghisap candu itu akan membelanjakan penghasilan kerja kerasnya di perkebunan untuk membeli benda madat itu. Dan pada saat mereka tidak mempunyai uang untuk membeli candu, maka dengan mudah perusahaan perkebunan memberikan pinjaman. Apabila pinjaman itu tidak terbayar, maka masa kontrak kerja buruh itu diperpanjang. Pada akhirnya, memang, perdagangan candu itu telah menyebabkan ribuan buruh tetap bekerja di perkebunan tanpa dapat mewujudkan harapan mereka untuk dapat pulang kembali ke kampung halaman.

Penutup

Apa yang ingin digambarkan dalam tulisan ini adalah sebuah kenyataan bahwa sistem usaha perkebunan yang dikembangkan sejalan dengan cita-cita politik liberal, telah membawa dampak yang saling berlawanan. Di satu sisi para pengusaha perkebunan – dengan dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda – telah memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar. Sedangkan di sisi lain penduduk di daerah Sumatera Timur – tempat di mana perkebunan itu berada – tidak mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berarti.

Hal itu semakin memperkuat tesisnya Kennedy,³⁵ bahwa salah satu kebijaksanaan negara-negara kolonial di manapun berada – termasuk pemerintah kolonial Belanda di Indonesia – akan selalu mempertahankan sistem kontrol politik yang represif dan diskriminatif, serta sistem ekonomi yang eksploitatif. Yang terakhir ini diupayakan agar dalam jangka panjang, sistem ekonomi daerah kolonial yang berada di *periferal* (pinggiran) itu dapat dikuasai dan tergantung sepenuhnya kepada daerah *sentral* (pusat), seperti di Eropa atau Amerika Serikat. Dan daerah perkebunan di Sumatera Timur, nampaknya, adalah sebuah kasus sejarah dari sistem ekonomi kolonial yang dibangun dan diupayakan untuk tujuan-tujuan seperti itu.

³⁵Raymond Kennedy, “The Colonial Crisis and the Future” in Ralph Linton (Ed.), *The Science of Man in the World Crisis* (New York: Columbia University Press, 1946), hlm.306-46.

Sebab pada akhirnya, sekali pemerintah kolonial kehilangan pengendalian atas komunitas-komunitas lokal yang mengelilingi perkebunan tersebut, tulis O'Malley³⁶ sekali lagi, maka masa depan perkebunan menjadi suram, bersamaan dengan sirnanya penjajahan itu sendiri. Persoalannya sekarang adalah: setelah Indonesia merdeka selama lebih dari setengah abad, adakah perubahan secara struktural terhadap kondisi kehidupan dan kesejahteraan buruh dan penduduk di daerah perkebunan Sumatera Timur khususnya dan Indonesia umumnya?

³⁶William J.O'Malley, 1988, *Op.Cit.*, hlm.235.

ANDI SUWIRTA,
Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah

PETA WILAYAH PERKEBUNAN DI SUMATERA TIMUR

(Sumber: Jan Breman, *Koelies, Planters en Koloniale Politiek: Het Arbeidsregime op de Grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het Begin van de Twintigste Eeuw*.
Leiden: KITLV Uitgeverij, 1992, hlm.24)

DAFTAR PUSTAKA

- Almanak Nasional*. 1942.
- Breman, Jan. 1992. *Koelies, Planters en Koloniale Politiek*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Day, Clive. 1904. *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. London: The Macmillan Company.
- Elson, R.E.. 1978. *The Cultivation System and Agricultural Involution*. Melbourne: Centre of Southeast Asia Studies, Monash University.
- Fasseur, Cornelis. 1992. *The Politics of Colonial Exploitation Java: The Dutch and the Cultivation System*. Ithaca, New York: Southeast Asia Program.
- Geertz, Clifford. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Gordon, Alec. 1982. "Indonesia, Plantation and Post Colonial Mode of Production" dalam *Journal of Contemporary Asia*, No.2 (12).
- Kennedy, Raymond. 1946. "The Colonial Crisis and the Future" in Ralph Linton (Ed.). *The Science of Man in the World Crisis*. New York: Columbia University Press.
- Klosterboer, W.. 1992. *Involuntary Labour Since the Abolition of Slavery*. Leiden: E.J. Brill.
- Langenberg, Michael van. 1990. "Sumatera Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah Keresidenan di Sumatera" dalam Audrey R. Kahin (Ed.). *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Terjemahan. Jakarta: Grafiti Pers.
- Lulofs, Madelon. 1984. *Koeli*. Terjemahan. Jakarta: Grafiti Pers.
- Lulofs, M.H. Szekely. 1985. *Berpacu Nasib di Kebun Karet*. Terjemahan. Jakarta: Grafiti Pers.
- Niel, Robert van. 1992. *Java Under the Cultivation System*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- O'Malley, William J.. 1977. "Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatera and Jogjakarta in the 1930's". *Ph.D. Thesis Unpublisch*. Ithaca: Cornell University.
- O'Malley, William Joseph. 1988. "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar" dalam Anne Booth, William J.O'Malley, dan Anna Wiedemann (Ed.). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Pelzer, Karl J.. 1985. *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Ed.). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Razif. 1991. "Penguasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan Besar di Sumatera Timur: Tinjauan Historis" dalam *Prisma*, No.4, Th.XX. Jakarta: LP3ES, April.
- Reid, Antony. 1970. "Early Chinese Migration into North Sumatera" dalam Jerome Ch'en and Nicholas Tarling (Ed.). *Studies in the Social History of China and Southeast Asia*. London: Cambridge University Press.
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suparlan, Parsudi. 1976. "The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society". *Ph.D. Thesis Unpublisch*. USA: University of Illionis.

ANDI SUWIRTA,
Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah

- The National Anti-Opium Association of China. 1929. *Opium: A World Problem*.
Shanghai: NAOAC.
- Wie, Thee Kian. 1977. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of
East Sumatera, 1863-1942*. Jakarta: National Institute of Economic and Social
Research.
- Willoughby, W.W.. t.t.. *Opium as an International Problem: The Geneva Conferences*.
Baltimore: The John Hopkins University Press.